

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sudah mempersiapkan pembangunan nasional dalam rangka merealisasikan Indonesia Emas pada tahun 2025. Pembangunan nasional seringkali mendapatkan suatu tantangan, tantangan negara berkembang saat ini adalah kesenjangan pendapatan adalah akar penyebab kemiskinan dan disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. tingkat pengangguran terbuka yang tinggi bisa meningkatkan kemiskinan. Pengangguran bisa menyebabkan penurunan pendapatan dan produktivitas, yang bisa mengakibatkan menimbulkan kemiskinan serta masalah sosial lainnya. Meningkatkan Satu dari sekian tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi nasional sebab hal ini akan memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan dan pengaturan kehidupan yang baik bagi semua orang, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa ditingkatkan (Sari et al., 2022).

Pembangunan ekonomi adalah proses hal ini bermaksud untuk mendorong ekspansi ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, kenaikan kualitas hidup, dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam konteks modern, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada kenaikan pendapatan nasional, tetapi juga memuat aspek-aspek yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah Indonesia sudah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi bisa

dirasakan di tiap-tiap tingkatan masyarakat dan wilayah. (Lestari et al., 2021) memaparkan bahwasanya pembangunan ekonomi di tingkat daerah memiliki peran signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional, sebab kemajuan ekonomi daerah berkontribusi pada kenaikan kesejahteraan di tingkat nasional.

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi ketidakmerataan antarwilayah, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan signifikan. Faktor seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan demografi menjadi penyebab utama kesenjangan ini (Hidayadi & Niam, 2022). Akses yang lebih besar tersedia di daerah yang lebih maju ke infrastruktur dan investasi, sementara daerah tertinggal mengalami keterbatasan dalam pembangunan. Jika tidak ditangani, kesenjangan ini bisa memicu kecemburuan sosial, ketidakstabilan politik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Terkait dengan hal itu, diperlukan kebijakan strategis untuk meminimalisir ketimpangan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Dalam upaya mencapai tujuan pemerataan distribusi pendapatan, diperlukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Suryono (2000) memaparkan bahwasanya pembangunan ekonomi perlu diupayakan dengan maksud agar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat per kapita bisa ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, pembangunan bisa meminimalisir disparitas pendapatan dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, investasi di sektor produktif, serta kenaikan kualitas sumber daya manusia (Dzikrirullah et al., 2024). Hal ini diharapkan bisa menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan yang adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Masalah disparitas pendapatan antar wilayah di Indonesia adalah tantangan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah yang memiliki sumber daya dan infrastruktur yang baik dengan wilayah yang kurang mendukung dalam aspek-aspek itu. Kabupaten Pacitan dan Wonogiri, kedua wilayah itu merupakan dua wilayah dengan karakteristik pembangunan ekonomi dan sosial yang berbeda

Kabupaten Pacitan, yang terletak di wilayah Selatan Provinsi Jawa Timur, memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks. Karakteristik wilayahnya yang berbukit-bukit dan terisolasi menyebabkan akses ke sejumlah fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi, menjadi terbatas di sejumlah wilayah. Keterbatasan akses ini membuat masyarakat di daerah terpencil sulit mengembangkan potensi ekonominya dan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Akibatnya, daerahnya relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses infrastruktur lebih baik.

Fenomena lain di kabupaten Pacitan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur memaparkan bahwasanya Kabupaten Pacitan menduduki peringkat ke-8 sebagai kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan tercatat sejumlah 76,20 ribu jiwa atau 13,65%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 13,80%. Tetapi, meskipun mengalami perbaikan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih cukup tinggi, berada di atas rata-rata kemiskinan Jawa Timur yang sebanyak 10,35% dan rata-rata nasional yang hanya 9,36%. Hal ini memperlihatkan bahwasanya permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih memerlukan

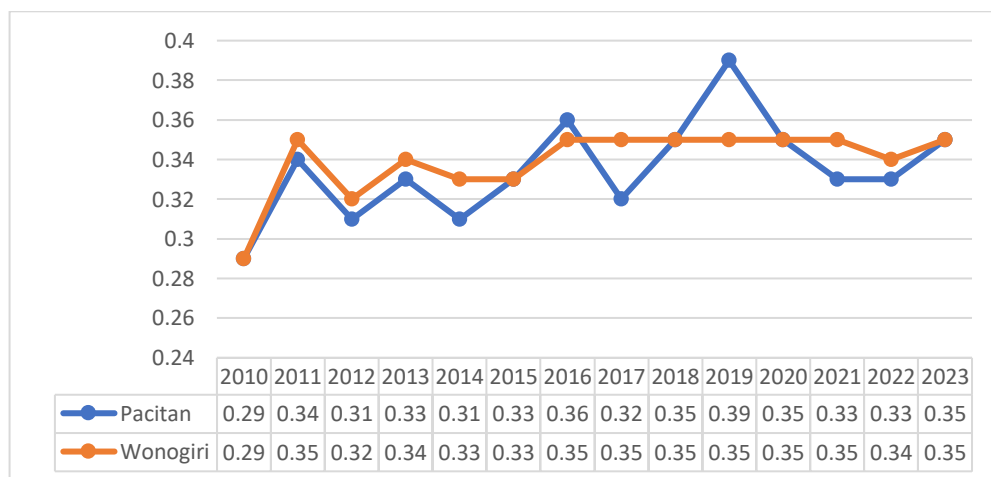
perhatian serius, terlebih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi.

Tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pacitan, tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya, seperti ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran pemerintah, Distribusi pendapatan menjadi satu dari sekian indikator utama yang mencerminkan apakah kesejahteraan masyarakat tersebar secara merata atau masih timpang. Ketimpangan pendapatan yang tinggi bisa memperburuk kondisi kemiskinan, terlebih saat terjadi penurunan pendapatan tenaga kerja yang menyebabkan kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki pengeluaran di atas garis kemiskinan terperosok ke dalam kategori miskin

Di sisi lain, Kabupaten Wonogiri yang terletak di Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai wilayah strategis, Wonogiri memiliki akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi. Keunikan lainnya terletak pada jarak tempuh, di mana Wonogiri yang berada di provinsi berbeda justru memiliki akses yang lebih cepat ke Surabaya dibandingkan Pacitan yang masih satu provinsi dengan ibu kota Jawa Timur itu. Kondisi ini memberikan keunggulan bagi Wonogiri dalam hal akses infrastruktur, peluang investasi, serta mobilitas barang dan jasa dibandingkan dengan Pacitan. Di lain sisi, Wonogiri memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian hingga industri kecil dan menengah, yang berkontribusi pada perkembangan wilayahnya. Faktor-faktor itu membuat Wonogiri cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan.

Permasalahan Kabupaten Wonogiri yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperhatikan dari Pendapatan per kapita yang dimana itu indikator utama tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun pendapatan per kapita mengalami kenaikan tiap-tiap tahun, tingkat kemakmuran daerah ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain, yang diperburuk oleh keterbatasan potensi ekonomi dan jumlah penduduk yang besar. Hal ini tampak dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yakni 10,25% pada tahun 2019, serta kenaikan Indeks Williamson dari 0,30662 pada 2016 menjadi 0,32360 pada 2019, yang memperlihatkan tren kenaikan ketimpangan pendapatan. Di lain sisi, angka kemiskinan di Wonogiri masih belum mencapai target nasional sebanyak 7-8% sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017.

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Gini Kabupaten Pacitan dan Wonogiri
2010 – 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (*data diolah*)

Pada gambar 1.1 bisa dijelaskan bahwa Indeks Gini di Kabupaten Pacitan mengalami pergerakan secara fluktuatif, pada tahun 2019 Kabupaten Pacitan

mengalami nilai ketimpangan tertinggi mencapai 0,39. Di lain sisi, di Kabupaten Wonogiri ketimpangan tertinggi mencapai 0,35 dan pergerakannya relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan.

Proses pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung mencerminkan kenaikan kondisi perekonomian suatu daerah, ditandai dengan kenaikan pendapatan masyarakat, produksi barang dan jasa, kemampuan produksi, serta output per kapita dalam jangka panjang. Perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) dari waktu ke waktu adalah aspek yang dimanfaatkan untuk mengukur pertumbuhan yang merupakan tolak ukur sukses tidaknya suatu pembangunan ekonomi (Dahliah, 2023).

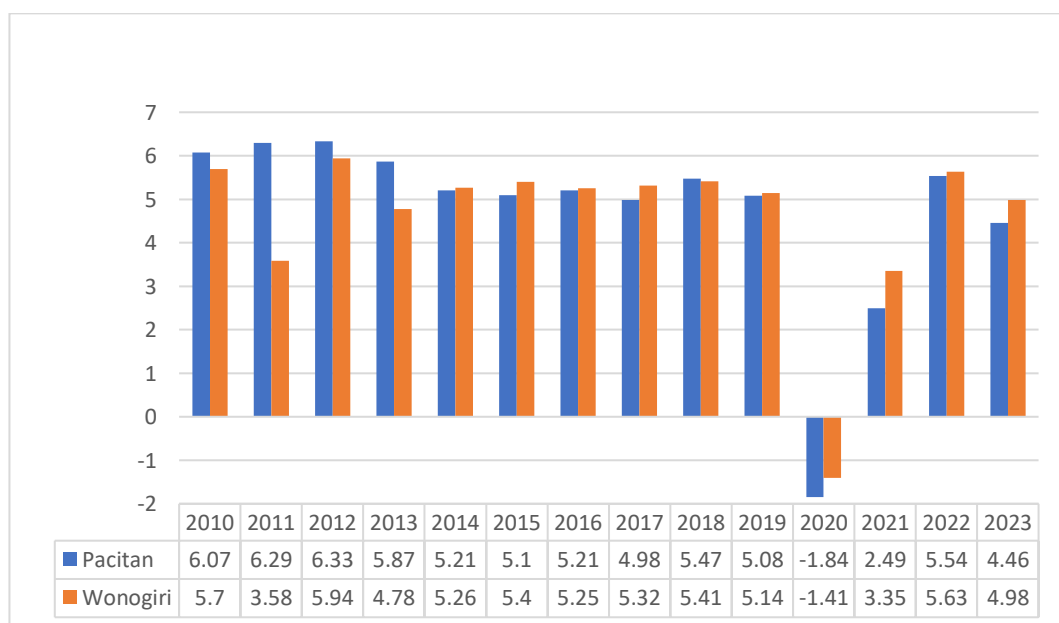
Pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan memiliki hubungan yang kompleks, di mana pertumbuhan ekonomi bisa berpengaruh pada distribusi pendapatan di suatu wilayah. Secara ideal, Pendapatan bisa meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif masyarakat secara merata, sehingga memperkecil kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Tetapi, dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru bisa memperburuk disparitas pendapatan.

Gambar 1.3 memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi selama 2010-2023. Tren kenaikan terjadi hingga 2012, mencapai 6,33%, yang berdampak positif pada pendapatan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Tetapi, periode 2013-2017 mengalami penurunan hingga 4,98%, sebelum kembali meningkat ke 5,47% pada 2018. Tahun 2019-2020 terjadi penurunan tajam akibat pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan mencapai -

1,84% pada 2020. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada 2021 (2,49%), meningkat ke 5,54% pada 2022, lalu sedikit menurun menjadi 4,46% pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri selama 2010-2023 relatif stabil dibandingkan Pacitan. Pada 2010, pertumbuhan tercatat 5,7% dan mencapai puncak 5,94% pada 2012. Periode 2013-2019 cenderung stagnan di kisaran 5,14%-5,41% akibat minimnya diversifikasi ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan pertumbuhan turun menjadi -1,41%, tetapi pemulihan lebih cepat dibanding Pacitan, dengan kenaikan ke 3,35% (2021) dan 5,63% (2022), sebelum sedikit menurun ke 4,98% (2023). Secara keseluruhan, Wonogiri memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan pemulihan yang lebih konsisten dibandingkan Pacitan.

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan dan Wonogiri 2010 – 2023

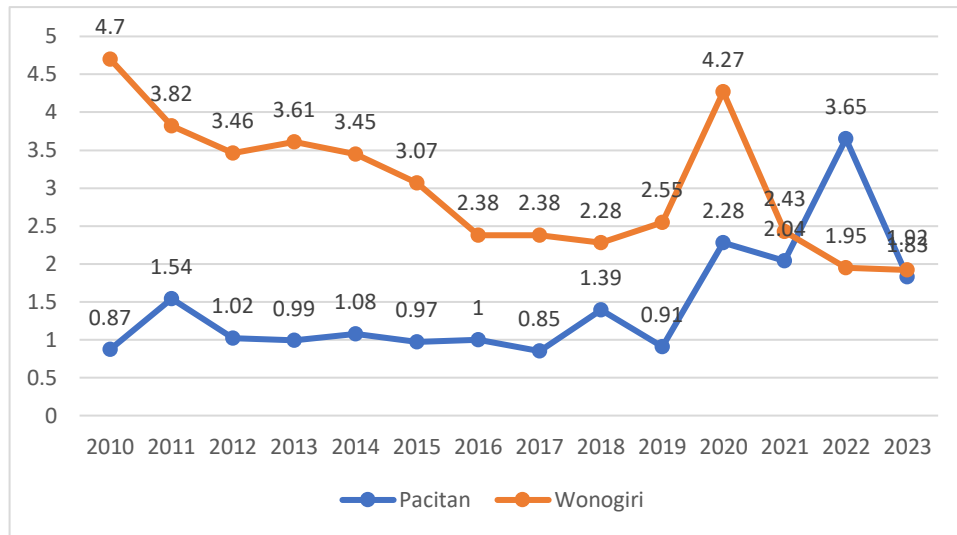


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (*data diolah*)

Disparitas pendapatan bisa terjadi jika tingkat pengangguran di suatu wilayah cukup tinggi. Pengangguran mengakibatkan banyak orang kehilangan pendapatan, memperlebar kesenjangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, yang meminimalisir peluang kerja dan memperburuk ketimpangan sosial. Berdasarkan gambar 1.4, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi selama periode 2010–2023. Sesudah meningkat menjadi 1,54% pada 2011, pengangguran menurun hingga 0,85% pada 2017. Tetapi, periode 2018–2022 memperlihatkan kenaikan, mencapai puncak 3,65% pada 2022 akibat dampak COVID-19 yang mengganggu sektor ketenagakerjaan dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Pada 2023, pengangguran turun signifikan ke 1,83% seiring dengan pemulihan ekonomi, kenaikan investasi, serta membaiknya kondisi sektor usaha yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonogiri pada 2010 mencapai 4,7%, tertinggi dalam periode 2010–2023. Selanjutnya, terjadi tren penurunan hingga 2,28% pada 2018, memperlihatkan perbaikan ketenagakerjaan. Tetapi, dampak COVID-19 menyebabkan kenaikan kembali hingga 4,27% pada 2020. Sesudah itu, pengangguran kembali menurun hingga 1,85% pada 2023. Penurunan ini memperlihatkan adanya pemulihan ekonomi dan kenaikan kesempatan kerja di sejumlah sektor. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Wonogiri tetap lebih tinggi dibandingkan Pacitan sepanjang periode itu.

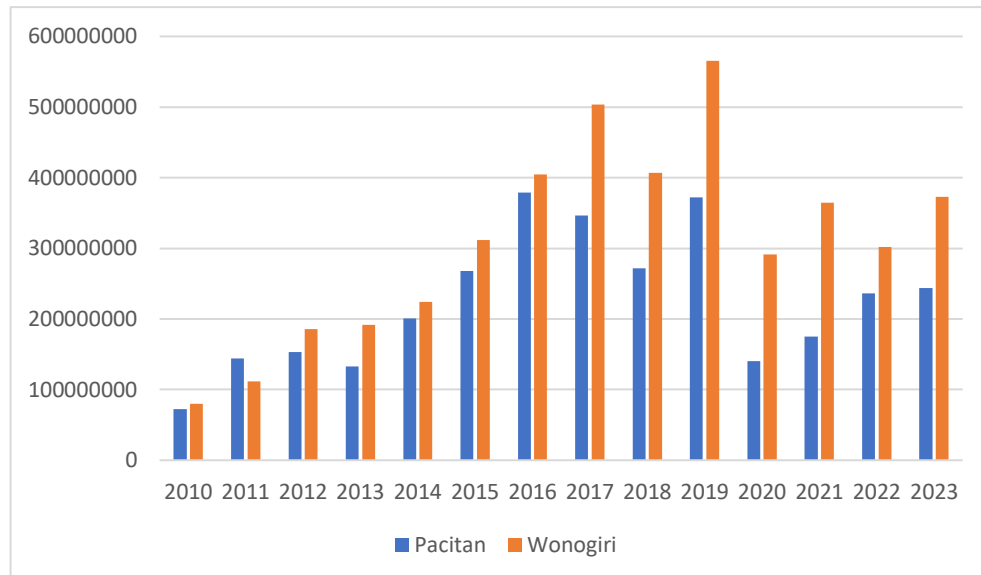
Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan dan Wonogiri 2010 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (*data diolah*)

Pembangunan perekonomian suatu wilayah sangat menerima dampak dari besarnya anggaran yang dialokasikan, terlebih pada belanja modal yang dipakai untuk penambahan aset tetap. Kebutuhan public bisa terpenuhi, lapangan kerja bisa diciptakan, serta pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan bisa oleh pemerintah saat modal dibelanjakan secara efektif dan efisien. Di lain sisi, pemerintah memainkan peran penting dalam memikat investasi swasta, terlebih di negara-negara berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, tol, irigasi, dan listrik bisa meningkatkan daya tarik investasi, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta memuncu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sehingga ketimpangan antar daerah bisa diminimalisir (Tjahjanto et al., 2024). pengelolaan anggaran daerah yang tepat, terlebih dalam belanja modal dan upaya menarik investasi swasta, menjadi kunci dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Gambar 1. 4 Grafik Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pacitan dan Wonogiri 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (*data diolah*)

Grafik 1.4 memperlihatkan tren belanja modal Kabupaten Pacitan dan Wonogiri dari tahun 2010 hingga 2023. Secara umum, belanja modal di kedua daerah mengalami kenaikan hingga tahun 2019, dengan Wonogiri lebih berharga daripada Pacitan. Tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan di kedua daerah, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19. Sesudah itu, belanja modal kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2023, meskipun belum mencapai puncak seperti tahun 2019. Hal ini memperlihatkan bahwasanya kedua daerah berupaya untuk memulihkan investasi pemerintah sesudah periode ketidakstabilan ekonomi.

Agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa berjalan optimal, diperlukan upaya untuk menekan angka ketimpangan pendapatan, terlebih antar daerah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi di sejumlah wilayah, di lain sisi pertumbuhan yang relatif rendah dialami oleh daerah lain. Ketimpangan ini sering

kali disebabkan oleh perbedaan dalam ketersediaan sumber daya serta tingkat pembangunan di masing-masing daerah. Meskipun Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan pusat ekonomi di Pulau Jawa, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai, seperti yang terlihat di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Modal Terhadap disparitas Pendapatan Di Kabupaten Pacitan Dan Wonogiri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah sejumlah masalah yang dirumuskan dalam studi ini berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas:

1. Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri ?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri ?
3. Apakah Belanja modal berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam studi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas:

1. Untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.
2. Untuk menganalisis apakah di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka secara signifikan mempengaruhi kesenjangan pendapatan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.
3. Untuk menganalisis apakah Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini, seperti data time series pada tahun 2010 – 2023 Di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Data sekunder adalah jenis data yang dihimpun dalam studi ini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010 – 2023. Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan apakah variabel ketimpangan pendapatan di Indonesia menerima dampak dari belanja modal, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Di lain sisi, penelitian ini juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan bisa menjadi sumber daya bagi para peneliti di masa depan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang signifikan dalam mendukung para pembuat kebijakan, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, menyajikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Pacitan dan Wonogiri